KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

8TUIRCVA

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	0 0 0 0 1 7 5 3		H.4 X	Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 1 4 5 4 5 5 5 5 5 7 2 6 0 0 0						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : JAYA MUALIMIN						
P. DDb DASAL 24 VANC DIDOTONG						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG JUMLAH PENGHASILAN TARIF LEBIH						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5 21-402-01	24.180.000	24.180.000	0	15	3.627.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota						
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022						
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy						
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
Nomor: Tanggal dd mm yyyy						
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :						
C.4 Tanggal :	1 1 dd 0 5 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan :	RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						